



RISALAH

RAPAT PARIPURNA

DPRD KABUPATEN MALANG

- HARI : SELASA**
- TANGGAL : 4 JUNI 2024**
- PUKUL : 14.00 WIB**
- TEMPAT : RUANG RAPAT PARIPURNA**
- AGENDA :**
- 1. PENYAMPAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2025-2045; DAN**
 - 2. PERSETUJUAN BERSAMA BUPATI DAN DPRD KABUPATEN MALANG TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN MALANG TAHUN ANGGARAN 2023.**

A. PIMPINAN RAPAT



Nama : DARMADI, S.Sos

Jabatan : KETUA DPRD KABUPATEN MALANG

B. SEKRETARIS RAPAT



NAMA : BAGUS SULISTYAWAN, A.P, M.Si

Jabatan : SEKRETARIS RAPAT

C. ANGGOTA SESUAI FRAKSI

NO	NAMA ANGGOTA	JABATAN	PARTAI
1	DARMADI, S.Sos.	Ketua DPRD	PDI.P
2	Ir. H.M. KHOLIQ	Wakil Ketua	PKB
3	MISKAT , SH.MH	Wakil Ketua	GOLKAR
4	SODIKUL AMIN	Wakil Ketua	NASDEM
5	VENNY AYU SORAYA	Anggota	PDI.P
6	Hj.SUMA'I	Anggota	PDI.P
7	FATHUR ROHMAN , S.Pd.I	Anggota	PDI.P
8	BUSILAN , S.H	Anggota	PDI.P
9	Ir. BUDI KRISWIYANTO	Anggota	PDI.P
10	SIH PURWANINGTYASTUTI, S.H	Anggota	PDI.P
11	Dr. TANTRI BARAROH, SE, M.Si., M.AK.	Anggota	PDI.P
12	Dra. Hj.TUTIK YUNARNI	Anggota	PDI.P
13	RENI PUWINING TYAS	Anggota	PDI.P
14	WAHYU INDRIYATI	Anggota	PDI.P
15	YULIS FARIDA, SH	Anggota	PDI.P
16	KUNCORO, S.H	Anggota	PKB
17	NOFAN EKO PRASETYO	Anggota	PKB
18	MAHRUS ALI	Anggota	PKB
19	Hj. MASFUFAH, S.Pd.	Anggota	PKB
20	Drs. ABDUL ROKHIM	Anggota	PKB
21	MUSLIMIN, S.Pd.	Anggota	PKB
22	SUSIYONO	Anggota	PKB
23	ABDULLOH SATAR	Anggota	PKB
24	Drs. MOKHAMAD FAUZI, M.Ag.	Anggota	PKB
25	ALI MURTADLO, S.H	Anggota	PKB
26	H. ABU HANIF, S,PdI	Anggota	PKB
27	AHMAD FAUZAN, S,Sos.	Anggota	GOLKAR
28	DIAS WIDY WIRA ANDIANTO, S.Ap.	Anggota	GOLKAR
29	SUDARMAN, S.Pd.	Anggota	GOLKAR
30	DOFIC SOROANGGOMO	Anggota	GOLKAR
31	M. KHOIRUN, S.E	Anggota	GOLKAR
32	Ir. SUDJONO,MP	Anggota	GOLKAR
33	AGUSTINUS SURYA PRIHANTA	Anggota	GOLKAR
34	NINIK NURMIATI	Anggota	NASDEM
35	SA'RONI	Anggota	NASDEM
36	ABDUL GHOFUR	Anggota	NASDEM
37	H. ACHMAD ANDI, S.H., M.Hum.	Anggota	NASDEM
38	MUHAMMAD FAIZ, S.E.	Anggota	NASDEM
39	AMARTA FAZA, S.T.	Anggota	NASDEM
40	MOHAMMAD RISQI IRVANSYAH	Anggota	GERINDRA
41	RAHMAT KARTALA	Anggota	GERINDRA
42	FITRI YUHANA	Anggota	GERINDRA
43	UNGGUL NUGROHO, S.Si.	Anggota	GERINDRA
44	MOHAMMAD. SAIFUL EFFENDI	Anggota	GERINDRA
45	ZIA'UL HAQ	Anggota	GERINDRA
46	JOKO EKO SUJARWANTO	Anggota	GERINDRA

47	H. AHMAD DANIYAL	Anggota	PPP
48	M. TAUFIQ, S.PD.I	Anggota	PPP
49	H. HADI MUSTOFA, S.Kom.	Anggota	DEMOKRAT
50	SUTRISNO, S.H.	Anggota	HANURA
Jumlah		50 orang	8 PARTAI

D. SAMBUTAN KETUA DPRD KABUPATEN MALANG



- **ASSALAMU'ALAIKUM WR, WB.**
- **SELAMAT SIANG DAN SALAM SEJAHTERA,**
- **OM SWASTYASTU,**
- **NAMO BUDDHAYA,**
- **SALAM KEBAJIKAN,**
- **RAHAYU.**

RAPAT PARIPURNA DPRD, DAN HADIRIN YANG BERBAHAGIA

SESUAI CATATAN DI SEKRETARIAT DPRD, DARI 50 ORANG ANGGOTA DPRD YANG TELAH MENANDATANGANI DAFTAR HADIR ADA 40 ORANG, DENGAN DEMIKIAN TELAH MEMENUHI KUORUM SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 131 AYAT (1) HURUF **c**, PERATURAN DPRD KABUPATEN MALANG NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG TATA TERTIB DPRD KABUPATEN MALANG, MAKA DENGAN MENGUCAP **"BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIM"** RAPAT PARIPURNA DPRD PADA HARI INI, SELASA TANGGAL 4 JUNI 2024, SAYA NYATAKAN DIBUKA..... **(TOK!!! 1 X)**

YANG TERHORMAT,

YANG TERHORMAT,

SDR. BUPATI MALANG

SDR. WAKIL BUPATI MALANG;

SDR. PARA ANGGOTA FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH
KABUPATEN MALANG; ATAU YANG MEWAKILI;

SDR. PIMPINAN DAN SEGENAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG;

SDR. Pj. SEKRETARIS DAERAH, STAF AHLI BUPATI, ASISTEN
SEKRETARIS DAERAH, DAN PARA PEJABAT STRUKTURAL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALANG;

REKAN-REKAN PERS, HADIRIN DAN UNDANGAN YANG BERBAHAGIA.

MENGAWALI RAPAT PARIPURNA DPRD HARI INI, MARILAH KITA
MENGUCAP PUJI SYUKUR KEHADIRAT ALLAH SWT, KARENA BERKAT RAHMAT,
TAUFIQ DAN HIDAYAH-NYA, KITA DAPAT MENGHADIRI RAPAT PARIPURNA
DPRD DALAM KEADAAN SEHAT WAL'AFIAT.

SHOLAWAT SERTA SALAM SENANTIASA TERCURAHKAN KEPADA
JUNJUNGAN KITA NABI MUHAMMAD SAW. BESERTA KELUARGA, SAHABAT
DAN PENERUS PERJUANGAN BELIAU HINGGA AKHIR ZAMAN.

SEGENAP PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KAMI MENGUCAPKAN
TERIMAKASIH DAN PENGHARGAAN YANG SETINGGI – TINGGINYA KEPADA
SAUDARA
BUPATI, WAKIL BUPATI, JAJARAN FORKOPIMDA DAN PARA UNDANGAN ATAS
KEHADIRANNYA PADA RAPAT PARIPURNA DPRD HARI INI.

SAUDARA BUPATI, WAKIL BUPATI, DAN HADIRIN SEKALIAN,

BERDASARKAN :

1. SURAT BUPATI MALANG NOMOR ; 007.7.2.1/4793/35/07.401/2024, TENTANG
PENYAMPAIAN RANPERDA TENTANG RPJPD TAHUN 2025-2045 KEPADA
DPRD KABUPATEN MALANG; DAN

2. RAPAT BADAN MUSYAWARAH TANGGAL 8 MEI 2024.
MAKA AGENDA RAPAT PARIPURNA HARI INI ADALAH :

1. **PENYAMPAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2025-2045**
2. **PERSETUJUAN BERSAMA BUPATI DAN DPRD KABUPATEN MALANG TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN MALANG TAHUN ANGGARAN 2023**

RAPAT PARIPURNA DPRD, DAN HADIRIN SEKALIAN

UNTUK ITU, MEMASUKI ACARA YANG PERTAMA, KITA IKUTI BERSAMA PENYAMPAIAN HASIL PEMBAHASAN DPRD TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN MALANG TAHUN ANGGARAN 2023.

UNTUK ITU, KEPADA JURU BICARA YANG TELAH DITUNJUK, DIPERSILAHKAN

.....Proses penyampaian Laporan DPRD atas Hasil Pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2023, oleh Juru Bicara DPRD.....



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Selamat Siang, Salam Sejahtera, Syaloom, Om Swastiastu, Namu Budhaya, Salam Kebajikan, Rahayu.

- Yang terhormat*
- *BUPATI MALANG;*
 - *WAKIL BUPATI MALANG;*
 - *SAUDARA KETUA, PARA WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN MALANG;*
 - *PARA ANGGOTA FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH KABUPATEN MALANG;*
 - *SAUDARA PJ. SEKRETARIS DAERAH DAN PARA PEJABAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALANG; SERTA*
 - *REKAN-REKAN WARTAWAN DAN HADIRIN UNDANGAN YANG BERBAHAGIA.*

Puji syukur marilah kita Panjatkan Kehadirat Allah SWT, Dzat yang Maha Suci, yang telah memberikan limpahan Rahmat dan Hidayah, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk hadir pada Rapat Paripurna DPRD hari ini dalam keadaan Sehat Walafiat, dalam rangka penyampaian Laporan atas hasil pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2023 yang telah dilaksanakan oleh Badan Anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah pada tanggal 28 Mei 2024 yang lalu.

Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, beserta para keluarga, sahabat dan para penerus ajarannya, serta mudah-mudahan dengan petunjuk dan bimbingan-Nya, kita dapat diberikan kekuatan dalam melaksanakan pengabdian kepada Negeri yang kita cintai ini.

Saudara Bupati, Wakil Bupati dan hadirin sekalian yang kami hormati,

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD memuat Laporan Keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan

Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, Catatan atas Laporan Keuangan, dan Laporan Kinerja yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan.

Melihat Laporan Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Anggaran menilai bahwa keberhasilan Pemerintah Kabupaten Malang dalam meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian untuk Kesepuluh kalinya merupakan hasil kerja keras dan cermat selama ini dan sudah sepatutnya kita syukuri dan menjadi tantangan bersama di waktu akan datang, agar kita bisa mempertahankannya. Catatan-catatan BPK merupakan pelajaran dan bahan evaluasi bagi kita semua untuk meningkatkan pengawasan dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang.

Selanjutnya pada kesempatan ini kami sampaikan hasil pembahasan Badan Anggaran dengan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Malang terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2023, sebagai berikut :

a. Pendapatan

Target Pendapatan Daerah pada APBD Tahun 2023 ditetapkan sebesar 4 Triliun 501 Miliar 832 Juta 816 Ribu 808 Rupiah, terealisasi sebesar 4 Triliun 375 Miliar 225 Juta 182 Ribu 406 Rupiah 89 Sen atau 97,19 %, yang bersumber dari:

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebesar 983 Milyar 28 Juta 679 Ribu 582 Rupiah, terealisasi sebesar 763 Milyar 117 Juta 874 Ribu 61Rupiah 91 Sen atau 77,63%;

2) Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer yang direncanakan sebesar 3 Triliun 178 Miliar 842 Juta 234 Ribu 524 Rupiah, terealisasi sebesar 3 Triliun 239 Miliar 566 Juta 166 Ribu 862 Rupiah atau 101,91%;

3) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah APBD Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar 297 Miliar 404 Juta 527 Ribu Rupiah, terealisasi sebesar 296 Miliar 752 Juta 59 Ribu 1 Rupiah atau 99,78%.

b. Belanja

Alokasi anggaran untuk Belanja dianggarkan sebesar 4 Triliun 705 Miliar 964 Juta 209 Ribu 126 Rupiah, terealisasi sebesar 4 Triliun 303 Miliar 906 Juta 80 Ribu 736 Rupiah 83 Sen atau 91,46%, yang terdiri dari:

1) Belanja Operasi

Belanja Operasi dianggarkan sebesar 3 Triliun 350 Miliar 964 Juta 20 Ribu 286 Rupiah, terealisasi sebesar 2 Triliun 994 Miliar 600 Juta 953 Ribu 868 Rupiah 83 Sen atau 89,37%;

2) Belanja Modal

Belanja Modal dianggarkan sebesar 578 Miliar 498 Juta 629 Ribu 921 Rupiah, terealisasi sebesar 549 Miliar 383 Juta 173 Ribu 460 Rupiah atau 94,97%;

3) Belanja Tak Terduga

Belanja Tak Terduga dianggarkan sebesar 3 Miliar 209 Juta 649 Ribu 650 Rupiah, terealisasi sebesar 1 Miliar 379 Juta 689 Ribu 219 Rupiah atau 42,99%;

4) Belanja Transfer

Belanja Transfer dianggarkan sebesar 773 Miliar 291 Juta 909 Ribu 269 Rupiah, terealisasi sebesar 758 Miliar 542 Juta 264 Ribu 189 Rupiah atau 98,09%.

Dengan demikian setelah total Pendapatan Dikurangi dengan total Belanja terdapat **surplus** Anggaran sebesar 71 Miliar 319 Juta 101 Ribu 670 Rupiah 6 Sen.

c. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah terdiri atas :

1. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan sebesar 216 Miliar 131 Juta 392 Ribu 318 Rupiah 25 Sen.

2. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan sebesar 12 Miliar.

Dengan demikian total Pembiayaan Netto sebesar 204 Miliar 131 Juta 392 Ribu 318 Rupiah 25 Sen dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) pada APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar 275 Miliar 450 Juta 493 Ribu 988 Rupiah 31 Sen. Dimana Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tersebut akan dimasukkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sebagai penerimaan pembiayaan.

Hadirin sekalian yang kami hormati,

Dari hasil pembahasan Badan Anggaran bersama Tim Anggaran ada beberapa hal yang menjadi bahan Evaluasi terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2023 diantaranya adalah:

1. Penetapan Target Pendapatan Asli Daerah seharusnya disesuaikan dengan data potensi PAD, dalam hal ini setiap pembahasan Anggaran kami selalu meminta data potensi PAD tersebut namun sampai dengan saat ini belum pernah disampaikan. Dalam upaya peningkatan PAD baik pajak daerah maupun retribusi daerah bisa dipahami adanya hambatan baik internal maupun eksternal dan dalam upaya ini dapat ditempuh dengan cara intensifikasi dan ekstensifikasi. Aktivitas intensifikasi meliputi: validitas data potensi pajak daerah, peningkatan sosialisasi perpajakan, peningkatan operasi mendadak (SIDAK), penegakan sanksi hukum, peningkatan pengawasan dan pembinaan aparat, penagihan terhadap para penunggak pajak daerah, dan pemberian *reward* bagi wajib pajak aktif. Sedangkan aktivitas ekstensifikasi dengan cara meningkatkan pendapatan pajak dapat pula diupayakan dengan mengembangkan pungutan jenis pajak yang baru sepanjang tidak menyimpang dari ketentuan dalam UU No. 34 Tahun 2000. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai tolak ukur kekuatan fiskal pemerintah daerah tidak hanya besarnya saja, tetapi juga komposisinya terhadap jumlah pendapatan daerah selain dari pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Kondisi saat ini pendapatan transfer masih mendominasi sumber pendapatan sebesar 101,91%, hal ini menggambarkan masih tingginya ketergantungan dari dana transfer pusat. Inovasi demi meningkatkan PAD sangat diperlukan untuk meningkatkan PAD. Urusan pendapatan daerah bukan hanya urusan Bapenda dan PD penghasil saja, peningkatan pendapatan itu tugas kita semua. Kami memberikan perhatian serius terhadap capaian realisasi retribusi daerah sebesar 28,94% dari target yang ditentukan, karena kurang optimalnya pemahaman data potensi oleh Perangkat Daerah penghasil, manajemen

- pengumpulan pajak perlu terintegrasi dengan organisasi terkait sehingga data objek pajak lebih akurat dan perlu peningkatan kesadaran terhadap wajib pajak;
2. Kekurangan Volume atas Pekerjaan Belanja Jasa Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, Kekurangan Volume atas Pekerjaan Belanja Modal yang selalu menjadi temuan berulang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setiap tahun. Terhadap persoalan ini, agar dilakukan evaluasi supaya tidak terjadi di tahun berikutnya. DPRD Kabupaten Malang mengharapkan di tahun-tahun yang akan datang catatan kita berkurang dan/atau tidak terulang di temuan yang sama serta bisa mempertahankan Opini atas laporan Keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dalam hal pengelolaan keuangan daerah, Perangkat Daerah tidak maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kami mendorong Inspektorat lebih meningkatkan perannya dalam melakukan pemeriksaan internal (pembinaan) atas penatausahaan anggaran yang dikelola Perangkat Daerah;
 3. Kami terus menghimbau untuk melakukan perencanaan yang lebih akurat, efektif, efisien dan tepat guna pada program dan kegiatan di masing-masing Perangkat Daerah untuk mengukur pencapaian Visi Misi Kepala Daerah di setiap Tahun Anggaran sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan pada masing-masing Perangkat Daerah.

Selain hal-hal tersebut di atas, kami juga memberikan perhatian serius terhadap beberapa temuan yang disajikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Pemeriksaan Atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan) yang terdapat pada beberapa Perangkat Daerah. Dari catatan-catatan tersebut sudah ditindak lanjuti sesuai rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan dan memberikan peringatan kepada masing-masing Perangkat Daerah. Namun demikian Badan Anggaran menganggap hal tersebut menunjukkan bahwa dalam hal pengelolaan keuangan daerah, Perangkat Daerah tidak maksimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kami mendorong Inspektorat untuk lebih meningkatkan perannya untuk bersinergi dengan semua Perangkat Daerah dalam melakukan pengawasan atas penatausahaan anggaran yang dikelola Perangkat Daerah. Dengan demikian diharapkan tidak terjadi lagi kesalahan-kesalahan yang sama dan menjadi temuan

lagi di tahun-tahun mendatang serta bisa mempertahankan Opini atas laporan Keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Hadirin sekalian yang kami hormati,

Selanjutnya perlu kami sampaikan bahwa, Badan Anggaran telah menyampaikan Laporan Hasil pembahasan dalam forum Rapat Paripurna sebelumnya, dan Fraksi-fraksi telah memberikan pendapat **menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2023 untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah**, dan fraksi-fraksi DPRD merekomendasikan untuk diproses lebih lanjut, sesuai dengan mekanisme peraturan perundangan yang berlaku.

Saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada TAPD, Banggar dan segenap anggota dewan serta hadirin yang telah mengikuti jalannya kegiatan rapat paripurna ini dengan penuh perhatian, mudah-mudahan apa yang kita hasilkan bermanfaat dan sesuai harapan masyarakat Kabupaten Malang.

Sekian dan terima kasih.

Wallahul Muwaffiq ila Aqwamit Tharieq

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALANG**

Ketua,



DARMADI, S.Sos.

Juru Bicara,



H. ABDULLOH SATAR, S.E.

**FRAKSI-FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALANG**

**FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA
PERJUANGAN**

KETUA



FATHUR ROHMAN, S.Pd

**FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN
BANGSA**

KETUA,



ALI MURTADLO, SH

FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA

KETUA,



SUDARMAN, S.Pd

FRAKSI PARTAI NASDEM

KETUA,



AMARTA FAZA, ST., M.Sos

FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA

KETUA,



MOCH. SAIFUL EFENDI, S.E.

BAPAK/IBU DAN HADIRIN SEKALIAN YANG BERBAHAGIA,

BARU SAJA KITA IKUTI BERSAMA, PENYAMPAIAN HASIL PEMBAHASAN DPRD TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN MALANG TAHUN ANGGARAN 2023.

KEPADA SAUDARA ABDULLAH SATAR YANG TELAH MENYAMPAIKAN, KAMI UCAPKAN TERIMAKASIH.

HADIRIN SEKALIAN YANG BERBAHAGIA,

MEMASUKI ACARA YANG SELANJUTNYA, KITA IKUTI BERSAMA PENYAMPAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2025-2045 SEKALIGUS PENYAMPAIAN PENDAPAT AKHIR BUPATI MALANG TERHADAP RAPERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN MALANG TAHUN ANGGARAN 2023, DAN DILANJUTKAN DENGAN PENANDATANGANAN/PERSETUJUAN BERSAMA RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN MALANG TAHUN ANGGARAN 2023, SEKALIGUS PENYERAHAN SECARA SIMBOLIS.

KEPADA **SAUDARA BUPATI**, DIPERSILAHKAN....

..... Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2025-2045 sekaligus Penyampaian Pendapat Akhir Bupati Malang Terhadap Raperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2023, Oleh Bupati Malang.....

.....dilanjutkan dengan Penandatanganan Persetujuan Bersama dan penyerahan secara simbolis, dipandu oleh petugas....



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Selamat siang, Salam Sejahtera Bagi Kita Semua, Syaloom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu.

SEMANGAT PAGI!!!

- YTH
- WAKIL BUPATI MALANG;
 - KETUA, PARA WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN MALANG;
 - PARA ANGGOTA FORKOPIMDA KABUPATEN MALANG ATAU YANG MEWAKILI;
 - Pj. SEKRETARIS DAERAH, PARA STAF AHLI BUPATI, PARA ASISTEN SEKDA DAN PARA PEJABAT PEMERINTAH KABUPATEN MALANG;
 - PARA WARTAWAN DAN HADIRIN UNDANGAN YANG BERBAHAGIA.

Mengawali sambutan pada rapat paripurna hari ini, terlebih dahulu marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena sampai dengan hari ini, kita semua masih dikaruniai nikmat sehat, nikmat selamat, nikmat kesempatan, dan nikmat kesejahteraan, untuk dapat melanjutkan ibadah kita, karya kita, tugas dan pengabdian kita kepada masyarakat, bangsa dan negara yang kita cintai ini. Hanya atas ridho-Nya pula, pada kesempatan

yang *Insyah Allah* penuh berkah ini, kita dapat bersama-sama berkumpul di tempat ini untuk menghadiri acara Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Malang, dengan agenda Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Malang Tahun 2025-2045, dan Persetujuan Bersama antara Bupati dan DPRD Kabupaten Malang terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2023.

Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan Yang Terhormat,

Terkait penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten Malang Tahun 2025-2045, dapat disampaikan bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 239 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Kabupaten Malang dan DPRD Kabupaten Malang telah menyepakati Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2024, sebagaimana Keputusan DPRD Kabupaten Malang Nomor: 188.4/27/KPTS/35.07.040/2023 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2024.

Adapun Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2024, diantaranya berisi rencana penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2025-2045, serta surat Bupati kepada Ketua DPRD Kabupaten Malang Nomor: 000.7.2.1/4793/35.07.401/2024 perihal Penyampaian Raperda tentang RPJPD Tahun 2025-2045 kepada DPRD Kabupaten Malang.

Berkaitan dengan RPJPD ini dapat disampaikan bahwa pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan Nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 258 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pelaksanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kerangka pembangunan nasional. Dalam pelaksanaannya, pembangunan daerah

harus bersinergi dan mendukung pencapaian target pembangunan Nasional, sehingga tujuan bernegara dapat diwujudkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan Nasional. Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud, disusun secara berjenjang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2025-2045 disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 dan mempedomani Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang Tahun 2023-2043 serta memperhatikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang.

Hal tersebut dilakukan untuk menyelaraskan visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Malang. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ini sangat diperlukan untuk menjadi pedoman atau acuan, menjamin keterkaitan antar dokumen, memberikan arah pembangunan, menjamin integrasi, sinkronisasi serta untuk kesinambungan program-program pembangunan daerah dan mengantisipasi pengaruh dinamika perubahan terhadap perkembangan. Maka dari itu, Pemerintah Kabupaten Malang wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 untuk mewujudkan pembangunan yang lebih baik dimasa depan.

Berkaitan dengan hal tersebut, ada beberapa poin penting yang ingin saya sampaikan terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2025-2045, yaitu:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2025-2045 merupakan pedoman untuk memberikan arah pembangunan

terhadap kebijakan dan strategi pembangunan di Kabupaten Malang sampai dengan Tahun 2045 atau 20 (dua puluh) tahun kedepan;

2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2025-2045 akan menjadi dasar Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Teknokratik dan menjadi pedoman dalam perumusan visi, misi, dan program bagi calon Kepala Daerah yang akan mengikuti Pilkada serentak Tahun 2024 dan masa mendatang;
3. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2025-2045 akan menjadi acuan dalam menyelaraskan Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan pada setiap periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang sesuai dengan Sasaran Pokok;
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2025-2045 akan menjadi tolak ukur dalam mengukur dan melakukan evaluasi kinerja Perangkat Daerah dan seluruh stake holder di Wilayah Kabupaten Malang setiap lima tahunan sampai dengan periode Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang berakhir pada Tahun 2045;
5. Visi Kabupaten Malang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2025-2045 adalah "Kabupaten Malang Maju, Sejahtera, Berdaya Saing dan Berkelanjutan";
6. Arah Kebijakan Tahun pertama Arah Kebijakan Pembangunan Lima Tahunan ke I (2025-2029) adalah Penguatan Landasan Transformasi;
7. Arah Kebijakan Pembangunan Lima Tahunan ke II (2030-2034) adalah Percepatan Transformasi;
8. Arah Kebijakan Pembangunan Lima Tahunan ke III (2035-2039) adalah Perluasan Transformasi; dan
9. Arah Kebijakan Pembangunan Lima Tahunan ke IV (2040-2045), adalah Transformasi Kabupaten Malang.

Berdasarkan hal-hal tersebut maka Pemerintah Kabupaten Malang menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2025-2045 untuk dilakukan pembahasan bersama. Rancangan Peraturan Daerah ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah dan rencana kerja tahunan, serta diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dalam melaksanakan pembangunan di Kabupaten Malang.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Selanjutnya berkaitan dengan Persetujuan Bersama terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2023, disampaikan terima kasih kepada semua pihak, utamanya kepada DPRD Kabupaten Malang, para anggota Panitia Khusus Raperda dan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Malang, yang telah bekerja keras bersama Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Malang dalam melakukan pembahasan-pembahasan, demi kesempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2023 ini. Kita tentunya patut bersyukur bahwasanya serangkaian proses mulai dari penganggaran, pelaksanaan sampai dengan pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2023, dapat terlaksana dengan baik.

Setelah melalui proses pembahasan serta penyelarasan dengan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI), dapat disampaikan bahwa konstruksi Realisasi Anggaran pada Tahun Anggaran 2023, adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah sebesar 4 Triliun 375 Miliar 225 Juta 182 Ribu 406 Rupiah 89 Sen;
2. Belanja Daerah sebesar 4 Triliun 303 Miliar 906 Juta 80 Ribu 736 Rupiah 83 Sen;
3. Pembiayaan Netto sebesar 204 Miliar 131 Juta 392 Ribu 318 Rupiah 25 Sen;
4. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar 275 Miliar 450 Juta 493 Ribu 988 Rupiah 31 Sen.

Selanjutnya untuk memenuhi ketentuan Peraturan Perundangan, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2023, hasil persetujuan bersama ini secepatnya akan disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur untuk dievaluasi sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 322 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dimana hasil evaluasi ini selanjutnya akan dipergunakan sebagai dasar penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2023.

Selanjutnya, perlu saya sampaikan pula bahwa berdasarkan hasil penilaian dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia terhadap pengelolaan keuangan pada Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Kabupaten Malang kembali berhasil meraih predikat **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** untuk yang ke-sepuluh kalinya.

Untuk itu, sekali lagi disampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerjasama dan sinerginya selama ini. Hal ini merupakan komitmen kita bersama dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, ekonomis, transparan dan akuntabel, serta taat pada peraturan perundang-undangan. Semoga pencapaian ini dapat terus dipertahankan, dan ditingkatkan agar menjadi penyemangat serta pendorong bagi kita untuk bekerja semaksimal mungkin, dalam memberikan pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat Kabupaten Malang.

Ke depan, kami tentu mengharapkan adanya kerjasama yang semakin solid antara eksekutif dan legislatif, sehingga pelaksanaan APBD tahun anggaran berikutnya juga dapat berjalan lebih baik lagi. Kami juga mengharapkan kepada semua pihak, terutama DPRD Kabupaten Malang agar tetap melakukan pengawasan, dan memberikan rekomendasi- rekomendasi positif, saran maupun kritikan, agar kualitas pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Malang juga dapat semakin meningkat. Untuk itu dengan semangat kebersamaan, kegotongroyongan dan saling mengingatkan, mari kita bertekad untuk bekerja lebih keras lagi dalam rangka meningkatkan kinerja pembangunan. *Insyah Allah* secara bertahap masyarakat juga akan semakin merasakan adanya peningkatan kesejahteraan dan hasil kemajuan pembangunan. Semoga kolaborasi dan sinergi yang baik ini akan terus berlanjut untuk masa-masa yang akan datang. Mudah-mudahan kerja keras yang telah kita lakukan ini mendapat balasan sebagai amal jariyah dan senantiasa mendapat ridho Allah SWT.

Rapat Paripurna Dewan yang terhormat,

Kiranya demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada rapat paripurna kali ini, sebagai penjelasan untuk menghantarkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2025-2045.

Sesuai mekanisme dan tata tertib, mohon untuk dapatnya DPRD Kabupaten Malang memberikan tanggapan, saran, dan masukan dalam rangka kesempurnaan Raperda tentang RPJPD Kabupaten Malang Tahun 2025-2045.

Sekali lagi disampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada segenap Pimpinan dan Anggota DPRD, Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Malang yang terhormat, yang telah mengikuti penjelasan ini dengan penuh perhatian, diiringi harapan agar penyampaian ini mendapat respon positif, khususnya dari Dewan yang terhormat, dalam rangka penjelasan lebih lanjut. Mudah-mudahan tindak lanjut dari Rapat Paripurna ini akan berjalan sesuai dengan agenda sebagaimana yang kita harapkan bersama.

Terakhir, sebelum mengakhiri sambutan ini saya mengucapkan SELAMAT dan SUKSES kepada Sekretariat DPRD Kabupaten Malang atas prestasi yang berhasil diraih sebagai Terbaik III Penghargaan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2024 Kategori Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota. Mudah-mudahan penghargaan ini menjadi penyemangat bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Malang, sekaligus mampu menjadi pendorong untuk terus meningkatkan kinerja dalam rangka optimalisasi serta peningkatan pelayanan publik di wilayah Kabupaten Malang.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua, dan memberikan kemudahan, serta kelancaran bagi kita, dalam melanjutkan langkah pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan Negara. *Aamiin.*

SEMANGAT PAGI!!!

Wallahul Muwaffiq ila Aqwamit Thariq.

Wassalamualaikum Warrohmatullahi Wabarokatuh.

Salam Sejahtera, Syaloom, Om Shanti Shanti Shanti Om,

Salam Kebajikan, Rahayu.

Malang, 4 Juni 2024

BUPATI MALANG

Drs. H.M. SANUSI, M.M.





RAPAT PARIPURNA DPRD DAN HADIRIN YANG SAYA HORMATI,

BARU SAJA KITA IKUTI BERSAMA PENYAMPAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RPJPD KABUPATEN MALANG TAHUN 2025-2045 SEKALIGUS PENYAMPAIAN PENDAPAT AKHIR BUPATI MALANG TERHADAP RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN MALANG TAHUN ANGGARAN 2023 DAN DILANJUTKAN DENGAN PENANDATANGANAN.

DENGAN DILAKSANAKANNYA PROSES PENANDATANGANAN PERSETUJUAN BERSAMA TADI, MAKA RAPERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN MALANG TAHUN ANGGARAN 2023 AKAN DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH SETELAH EVALUASI GUBERNUR. UNTUK ITU KEPADA SEMUA PIHAK DISAMPAIKAN TERIMA KASIH, KHUSUSNYA KEPADA *BADAN ANGGARAN BERSAMA DENGAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH* YANG TELAH MENYELESAIKAN TUGAS DENGAN BAIK DAN TEPAT WAKTU.

ATAS NAMA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KAMI SAMPAIKAN TERIMA KASIH DAN APABILA ADA HAL-HAL YANG KURANG BERKENAN KAMI MOHON MAAF YANG SEIKHLAS – IKHLASNYA.

AKHIRNYA DENGAN MENGUCAP SYUKUR “***ALHAMDULILLAHIROBILALAMIN***” RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG SAYA NYATAKAN DITUTUP**TOK!!! (3X)**

SEKIAN DAN TERIMA KASIH,

WALLAHULMUWAFIQ ILA AQWAMITTHORIQ,

WASSALAMU’ALAIKUM WR, WB.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MALANG
KETUA,**

DARMADI, S.Sos